

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Usaha

1. Pengertian Strategi Usaha

Istilah strategi (*strategy*), diartikan sebagai rencana skala besar dengan jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif guna mencapai tujuan perusahaan. Sebuah strategi merupakan rencana permainan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Suatu strategi mencerminkan kesadaran perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan dimana perusahaan berkompetisi akan melawan siapa dalam kompetisi tersebut dan untuk tujuan apa suatu perusahaan tersebut berkompetisi.¹

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntun keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. Disamping itu, strategi juga berpengaruh terhadap kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor - faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan.²

Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan secara terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk

¹Jhon A.Pearce dan Richard B.Robinson, Jr., *Manajemen Strategi* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 4.

²Rachmat, *Manajemen Strategik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 14.

badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu negara.¹

Strategi usaha adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi dimasa depan serta menggali kemampuan sumberdaya dan keahlian yang dimiliki organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Strategi usaha sangat penting dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan, kemampuan bersaing dengan segmentasi dan pangsa pasar yang diharapkan.²

2. Macam–macam Strategi Usaha

Pada umumnya berbagai organisasi bisnis yang terdapat di perusahaan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu organisasi bisnis yang terlibat pada satu bidang usaha, dan organisasi bisnis yang terlibat pada berbagai bidang usaha. Untuk organisasi bisnis hanya satu bidang, dapat ditemukan dua tingkat strategi yaitu strategi korporasi dan strategi fungsional. Sedangkan untuk organisasi yang memiliki berbagai bidang usaha, tingkat strategi yang berlaku antara lain:³

a. Strategi Korporasi

Yaitu strategi yang menggambarkan keseluruhan sikap perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.

Strategi ini berhubungan dengan pengalokasian dan pengelolaan sumber-

¹Harmaizar, *Menangkap Peluang Bisnis* (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2003), 14

²Rita Januarwati dan Eddy Poernomo, "Analisis Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Toko Bunga Cindy di Jalan Kayoon Utara Nomor 12 Gentengkali Surabaya" , *Jurnal Bisnis Indonesia*, 2 (Oktober 2014), 155

³Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 21

sumber daya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi dengan menyatukan unit-unit bisnis yang berbeda menjadi strategi organisasi yang menyeluruh.

b. Strategi Unit Bisnis

Merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk atau jasa perusahaan dalam segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini menitikberatkan pada pembuatan keputusan strategik untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi-strategi yang dikembangkan pada level unit bisnis berfokus pada jasa, produk dan bagaimana produk atau jasa yang dimiliki oleh masing-masing unit bisnis bersaing dalam suatu industri. Strategi bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan korporasi karena strategi ini membantu unit bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dan profitabilitas di dalam industri tertentu. Pencapaian keunggulan kompetitif dan profitabilitas oleh unit bisnis akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan korporasi secara keseluruhan.⁴

c. Strategi Fungsional

Pada tingkat fungsional perusahaan mengoptimalkan produktivitas sumber daya guna memperbaiki kinerja perusahaan, usaha dilakukan dengan memadukan kegiatan fungsional perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap kegiatan. Strategi fungsional ini memfokuskan

⁴ Ismail Solhin, *Manajemen Strategik* (Bandung: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), 210

pada kegiatan perusahaan yang mengacu pada struktur modal yang diinginkan perusahaan, kebijakan investasi, kebijakan utang, dan manajemen modal kerja. Dalam strategi ini perusahaan menekankan rumusan strategi internasional yang berorientasi pada besar dan arah investasi perusahaan dalam menciptakan produk baru dan mengembangkan teknologi baru.⁵

3. Strategi Usaha Dalam Perspektif Islam

Bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan Nya. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang sangat besar. Demikian pula, dengan bekerja manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja.⁶Dalam firman Allah SWT:

⁷ *وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ مَّا عَمَلُوا هُمْ لَا يُظْلَمُونَ*

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.” (QS. Al Ahqaf (46): 19)⁸

⁵ Rachmat, *Manajemen Strategik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 54

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 75

⁷QS. Al Ahqaf (46): 19

⁸Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009)

Dalam surat tersebut, umat islam didorong untuk menggunakan hari harinya untuk memperoleh keuntungan dan karunia Allah SWT, begitu pula dalam berusaha dilarang melakukan perbuatan curang dan memakan riba.⁹

Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai bisnis syariah. Sebelum memulai bisnis, pebisnis harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan strategi bisnisnya terlebih dahulu. Strategi bisnis tersebut meliputi lima sikap utama yaitu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi. niat suci dan ibadah, dan menunaikan zakat, infaq, dan sadaqoh.¹⁰

a. Jujur

Sikap jujur melahirkan kepercayaan konsumen dan pelanggan, kepercayaan akan melahirkan kesetiaan konsumen, jika konsumen sudah setia kepada produk yang di jual maka keuntungan akan terus mengalir.

b. Ikhlas

Sikap ikhlas akan membentuk pribadi seorang pebisnis tidak lagi hanya memandang keuntungan materil sebagai tujuan utama, tetapi juga memperhitungkan bagaimana mendapatkan ridha dari Allah SWT.

⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 79

¹⁰ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah* (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011), 40

c. Profesional

Profesional yang didukung oleh sikap jujur dan ikhlas merupakan dua sisi yang saling menguntungkan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa seseorang yang profesional mempunyai sikap selalu berusaha maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi suatu masalah, dan tidak mudah menyerah atau berputus asa.

d. Silaturahmi

Silaturahmi merupakan jembatan yang menghubungkan pebisnis dengan semua manusia, lingkungan, dan penciptanya. Silaturahmi menjadi dasar membina hubungan baik tidak hanya dengan pelanggan dan investornya, tetapi juga dengan calon pelanggannya dan bahkan dengan kompetitornya.

e. Niatsuci dan ibadah

Islam menegaskan keberadaan manusia di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹¹

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”
(QS. Az Zariyat (51): 56)¹²

¹¹ QS. Az Zariyat (51): 56

¹² Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009)

Bagi seorang muslim menjalankan usaha merupakan ibadah, sehingga usaha itu dimulai dengan niat suci, cara yang benar, tujuan yang benar, serta pemanfaatan hasil usaha yang benar.

f. Menunaikan zakat, infaq, dan shadaqoh

Menunaikan zakat, infaq, dan shadaqoh hendaknya menjadi budaya pebisnis syan'ah. Menurut ajaran islam harta yang digunakan untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqoh tidak akan hilang, bahkan menjadi tabungan kita yang akan dilipatgandakan oleh Allah di dunia dan akhirat, sehingga menyuburkan bisnis kita.¹³

B. Budidaya Ikan

1. Pengertian Budidaya Ikan

Budidaya adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangbiakan tanaman atau hewan supaya tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Ruang lingkup kegiatan budidaya ikan mencakup pengendalian pertumbuhan dan pengembangbiakan. Budidaya ikan bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi atau lebih banyak dan lebih baik daripada membiarkan ikan berkembang biak secara alami.¹⁴

Budidaya ikan melibatkan usaha pembesaran bakalan (ikan muda) atau bibit atau benih (termasuk benur dan nener) pada suatu lahan tertentu selama beberapa waktu untuk kemudian dijual.

¹³ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah* (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011), 41

¹⁴ Evy Ratna, *Usaha Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 11

Sebagian besar area budidaya ikan berada di Pulau Jawa. Area tambak terluas terdapat di Provinsi Jawa Timur, sedangkan area kolam dan budidaya ikan di sawah sebagian besar berada di Jawa Barat. Sudah sejak lama kegiatan budidaya ikan tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Indonesia. Budidaya ikan juga menjadi penyumbang sumber protein terbesar bagi masyarakat.¹⁵

2. Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Budidaya Ikan

Terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan budidaya ikan yang dilaksanakan yaitu faktor independen dan dependen.

Faktor independen adalah faktor yang umumnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, faktor-faktor tersebut adalah:

a. Lingkungan

Ciri-ciri fisik lingkungan yang penting bagi pengembangan budidaya perikanan sangat bergantung kepada ketersediaan dan kecocokan fisik dari areal untuk pengembangan budidaya perikanan yaitu:

- 1) Tersedianya lahan
- 2) Topografi dan elevasi lahan
- 3) Sifat-sifat tanah, teristimewa komposisi, tekstur dan kemampuan menahan air, sifat oseanografi perairan
- 4) Frekuensi, jumlah dan distribusi hujan
- 5) Mutu, kuantitas, ketersediaan dan aksesibilitas air

¹⁵ Ibid, 13

- 6) Kondisi cuaca, seperti suhu, laju penguapan, perubahan musim, frekuensi topan dan lamanya
- 7) Kualitas dan kuantitas populasi
- 8) Akses ke suplai dan pasar.

b. Faktor manusia

Faktor manusia meliputi sikap, adat istiadat dan gaya hidup dari warga, stabilitas dan kekuatan ekonomi serta politik dari pemerintah, faktor-faktor ini beragam dan kompleks, contohnya:

- 1) Sikap dan keterampilan produsen relatif terhadap mengadopsi teknologi dan modal untuk ditanamkan dalam produksi
- 2) Permintaan pasar, sikap konsumen, daya beli
- 3) Kemauan dan kemampuan pemerintah melengkapi prasarana kredit dan sebagainya
- 4) Kemampuan lembaga pemerintah melengkapi sistem dukungan pelayanan bagi pengembangan budidaya perikanan antara lain pelatihan bagi profesional, penelitian guna mengembangkan teknologi baru, dan penyuluhan

Faktor dependen adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Wadah budidaya ikan seperti tambak, kolam, keramba dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan manusia misalnya:
 - 1) Kolam lebih cocok di daerah lahan pegunungan

- 2) Keramba Jaring apung dikembangkan di perairan waduk dan laut
- b. Input hara berupa pupuk dan pakan tergantung kualitas dan kuantitasnya pada faktor lingkungan fisik, misalnya: unsur ramuan pakan tidak dapat diproduksi dimana lingkungan fisik tidak cocok bagi produksinya.
- c. Spesies ikan yang dibudidayakan sangat tergantung dari faktor-faktor spesifik tiap spesies.¹⁶

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar tentang masyarakat. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:¹⁷

- a. Peningkatan akan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhandasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan potensi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan

¹⁶ M. Fatuchri Sukadi, "Peningkatan Teknologi Budidaya Ikan", *Jurnal Iktologi Indonesia Vol.2 No.2* (2002), 63

¹⁷ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), 271

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan dari individu dan bangsa.

Menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Rudy Bahrudin bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.¹⁸ Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang objektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda.

Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.¹⁹ Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materi, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsisosialnya.”²⁰

¹⁸Rudy Bahrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yongyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 145

¹⁹Ibid., 146

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator-indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut instansi pemerintah yang menangani kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Badan Pusat Statistik(BPS)

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi untuk mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam satu tahun, frekuensi makan

setiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,00 seperti kepemilikan kendaraan motor kredit atau non kredit, emas, ternak, dan sebagainya. Jika minimal 9 variabel tidak terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memberikan batasan mengenai keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota, antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan,²¹ berikut tahapan beserta indikatornya:

1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*).

2) Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I)

²¹ Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), 21

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II)

Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.

- Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator kebutuhan pengembangan (*developmental needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator aktualisasi diri (*self esteem*) dari 21 indikator keluarga, yaitu:

- Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.²²

3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Falah*, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberi dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.²³

Menurut As-Shabiti, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*mal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak harus

²²<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 06.39 WIB

²³ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 2

dipenuhi agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan di atas tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.²⁴

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat dan (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi :²⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²⁶

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya’ (21): 107)²⁷

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu:²⁸

a. Kesejahteraan *holistic* dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri

²⁴ Ibid, 6

²⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887

²⁶ QS. Al-Anbiya’ (21): 107

²⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009)

²⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 4

atas unsur fisik dan jiwa, oleh karena itu kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Menurut Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip Adiwarmanto A. Karim bahwa kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*al-nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan duniawi dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*),

dan kemewahan (*tahsiniyat*).²⁹

Menurut Al-Ghazali bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Karena fitrah manusia pada dasarnya cenderung pada kebenaran, maka seluruh aspek kehidupan termasuk urusan usaha tidak terlepas dari syariah. Ini berlaku bukan hanya pada ajaran Islam, tetapi di semua ajaran.³⁰

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam Islam adalah wajib, sedemikian pula pergi ziarah haji ke Mekkah wajib bagi yang mampu. Orang Islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka berdagang setelah shalat.³¹

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antarlain dalam peringatan Allah swt kepada Adam, terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi :

²⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 62

³⁰Ibid., 63

³¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terjemah, Soeroyo Nastangin* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 52

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
 (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلًا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا
 تَضْحَى (١١٩)³²

Artinya : “Kemudian kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sngguh ada jaminan untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (QS. Thaha (20): 117-119)³³

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:³⁴

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten padakebenaran
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan

³² QS. Thaha (20): 117-119

³³ Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009)

³⁴ Ruslan Abdul Ghopur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 10

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable /tahsini*), dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan shadaqah. Dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan, dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.³⁵

³⁵Ibid, 89